

TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA

PEMBATALAN AKTA HIBAH

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

MUSYAROFAH IRMAWATI SHOFIA

NIM : C 100.060.129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri melainkan makhluk hidup yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain, saling membutuhkan dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk tolong-menolong ini bermacam-macam yaitu ada yang berupa jasa, jual-beli, hadiah dan lain sebagainya dan salah satu wujud tolong-menolong itu ada yang berupa hibah.

Hibah yaitu suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdota). Hibah dalam KUHPerdota digolongkan sebagai perjanjian dengan cuma-cuma yang ditujukan hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak memberikan kontra prestasi, Hibah dalam KUHPerdota ini merupakan bagian dari hukum perjanjian dan digolongkan perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu diwaktu hidupnya (Subekti, 1991,1). Pada dasarnya suatu perjanjian adalah bersifat timbal balik, dimana seseorang menyanggupi memenuhi prestasi yang disebabkan karena dia akan menerima kontra prestasi dari pihak lain.

Kadang kala karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain yang dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi. Begitu juga dengan hibah ini, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah dihadapan Notaris tapi kadang kala ada yang mencabut atau menariknya kembali. Yang dimaksud dengan mencabut atau menariknya kembali dalam hal ini tidak lain adalah membatalkan Hibah. Didalam KUHPdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri.¹ Adapun hibah yang boleh ditarik kembali adalah hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam). Ketentuan ini merupakan garis hukum islam berdasarkan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak, tetapi ketentuan ini tidaklah mudah dilaksanakan apabila barang yang dihibahkan sudah berganti tangan. Ulama Fiqh berpendapat apabila benda hibah masih dimiliki anak atau masih bergabung dengan milik orang tuanya dapat dicabut, tetapi apabila sudah bercampur dengan harta miliknya, istrinya atau dengan harta orang lain tidak dapat dicabut kembali. Undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang telah di berikan kepada

¹ Chairuman pasaribu, dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hal. 119.

seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu.² Adapun mengenai pembatalan hibah yang dilakukan oleh penghibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya ini baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 1688 KUHPerdara “ Suatu hibah tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut:“

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usia belum dewasa.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan.

Dari ketentuan Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah. Penarikan kembali hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah, disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan. Dimana dalam penarikan kembali hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Lebih jauh lagi menurut

² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986. hal. 278.

Abdulkadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana :

*“Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi didalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. Sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan didalam undang-undang”.*³

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang di sengkatakan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No. 552 K/Sip/1970 Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 237/1969 Jo Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 10/1964 ”Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa perkara hibah yang menurut hukum agama islam adapun yang berwenang adalah Pengadilan Agama (yurisprudensi Tahun 1970)”. Karena dalam kasus ini yang berperkara beragama non-islam, maka berdasarkan Yurisprudensi ini dapat kita lihat bawasannya yang berwenang membatalkan atau mencabut akta bagi orang yang beragama non-islam adalah pengadilan Negeri maka, pembatalan akta hibah ini dilakukan melalui pengadilan Negeri dimana benda itu berada atau tempat dimana tergugat itu tinggal. Agar hibah

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 15.

yang telah diberikan oleh penghibah ini dibatalkan oleh hakim untuk dikembalikan kepada penghibah. Sehingga dari prosedur pencabutan dan pembatalan berjalan berbarengan yakni dalam gugatan pembatalan hibah dan pencabutan hibah dari penerima hibah untuk dikembalikan kepada penghibah.⁴

Mengenai proses penyelesaian pembatalan akta hibah melalui pengadilan ini tidaklah mudah dilakukan karena dalam proses persidangan itu memerlukan adanya suatu pembuktian. Penentuan beban pembuktian merupakan masalah yang tidak mudah karena tidak ada satu pasalpun yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban pembuktian. Dalam praktek, majelis hakim memerlukan ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu diberi beban pembuktian lebih dahulu dan selanjutnya. Pasal 163 HIR, 283 Rbg mengatur beban pembuktian, tetapi tidak begitu jelas sehingga sulit untuk diterapkan secara tegas apakah beban pembuktian ada pada Penggugat atau Tergugat.

Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara *yuridis* adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti.

⁴ *Ibid*, hal. 279.

Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan terhadap atas hak maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Semua hak-hak perdata yaitu hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil yang dijadikan perselisihan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi.

Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.

Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum dalam hal adanya tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya main hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat.

Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengingat pentingnya proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan akta hibah diPengadilan Negeri maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN AKTA HIBAH (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting karena rumusan masalah ini memberikan arahan yang penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?
3. Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan dimuka maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang dipakai untuk menentukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini, maka penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum yang mengatur cara beracara perdata terutama mengenai penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

2. Bagi masyarakat

Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca/masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah

yang mungkin sedang dihadapi oleh pembaca terutama menyangkut penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

3. Bagi penulis

Dengan ditulisnya skripsi ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri serta tata cara penyelesaian perkara yang menyangkut pembatalan akta hibah.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan mengolah data serta menganalisanya.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif sosiologis,⁵ karena dalam penelitian ini

⁵ Pendekatan Normatif sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada yang berlaku saat ini. (Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986, hal. 250).

yang dicari adalah aspek-aspek hukum dari penyelesaian perkara pembatalan akta hibah yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya, dan dari sudut pandang sosial dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kasus ini terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau objek penelitian sebagaimana adanya.⁶ Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

⁶ *Ibid*, hal. 10.

1) Bahan Hukum Primer

- a) KUHPperdata
- b) Yurisprudensi
- c) HIR
- d) Rbg
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pembatalan akta hibah. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di pengadilan Negeri Surakarta. Adapun alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Surakarta,

yaitu karena diwilayah Surakarta mengenai perkara pembatalan akta hibah pernah terjadi, dan perkara tersebut diperiksa dipengadilan negeri Surakarta sehingga penulis memilih Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk melakukan penelitian.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara pembatalan akta hibah di Pengadilan Negeri Surakarta, dan Notaris yang telah membuat akta hibah.

4. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

b. Study lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada hubungannya dengan penulisan yang ada di pengadilan negeri Surakarta.

2) Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya secara langsung kepada informan atau pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memutus perkara pembatalan akta hibah, dan Notaris yang telah membuat akta hibah. Dengan demikian penulis lebih mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara tersebut.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan penyelesaian perkara pembatalan akta hibah di pengadilan negeri surakarta dipadukan dengan pendapat responden dilapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

⁷ Sugiarto, Dergibson, Siagian Lasmono, Tri Sunaryanto, Deny S. Oetomo, *Teknik Sampling*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 17.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini dan memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, maka garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Hibah
 - 1. Pengertian Hibah
 - 2. Kecakapan untuk Memberi dan Menerima Hibah
 - 3. Cara Penghibahan
 - 4. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah
- B. Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Hibah
 - 1. Pengertian Pembatalan Akta Hibah
 - 2. Fungsi Akta Hibah
 - 3. Orang yang Berhak Membatalkan Akta Hibah
 - 4. Alasan-alasan yang Membatalkannya Akta Hibah

5. Penyelesaian Pembatalan Akta Hibah

- C. Tinjauan Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri

1. Pengajuan Gugatan
2. Pemanggilan Para Pihak
3. Pemeriksaan Perkara
4. Pembuktian
5. Putusan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di pengadilan negeri Surakarta.

B. pembahasan

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di pengadilan negeri Surakarta.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran